

FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SEKOLAH OLAHRAGA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh :

Cahyo Bagus Puji Widodo, R Slamet Santoso, Aloysius Rengga

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract :

Education and sports coaching are two things that can not be separated in the lives of student athletes. The condition that eventually led to problems between education and sports coaching student athletes have not been able to run simultaneously, including in Central Java Province. Central Java Province is already running a program named PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar), but in fact have not been able to overcome the problems of education and sports coaching student athletes. Therefore, it needs a Policy Formulation Development of Sport School in Central Java Province that is expected to be a bridge between education and sports coaching student athletes to be able to overcome the problems of education and sports coaching student athletes in the Central Java Province.

Keywords: *Education and Sports Coaching, PPLP, Policy Formulation Development of Sport School.*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Olahraga menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Undang-Undang tersebut pada Bab VII pasal 21 sampai dengan pasal 30 telah mengatur jelas bagaimana cara Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan bidang keolahragaan. Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pembinaan dan

pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan prestasi olahraga. Ada tiga jenis pemberdayaan olahraga yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu : (1) Olahraga Pendidikan ; (2) Olahraga Rekreasi ; (3) Olahraga Prestasi.

Terkait fokus pembinaan olahraga yang telah dijelaskan dalam Undang-

Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional tersebut, bahwa pembinaan atlet-atlet pelajar di Provinsi Jawa Tengah masih terdapat beberapa permasalahan terutama dalam pengembangan olahraga pendidikan. Masalah-masalah yang ada diantaranya adalah pola pembinaan atlet pelajar yang masih bersifat desentralisasi di masing-masing wilayah dan masih terpisahnya antara kegiatan pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar membuat daerah Provinsi kesulitan mendapatkan izin sekolah bagi para atlet yang akan bertanding dalam sebuah kejuaraan olahraga. Kondisi tersebut membuat atlet dihadapkan pada dua pilihan yaitu antara pendidikan atau pembinaan olahraga. Hal tersebut menyebabkan para atlet pelajar harus meninggalkan pendidikan mereka untuk waktu yang cukup panjang pada saat mengikuti *Training Center* dan berarti untuk kemungkinan terburuk adalah atlet pelajar tersebut harus tinggal kelas di tahun tersebut atau minimal mereka masih dapat mengikuti pelajaran namun dengan waktu yang tidak maksimal sehingga akan berpengaruh pada nilai akademik mereka.

Dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia sudah terdapat 5 Sekolah Olahraga, yaitu Sekolah Olahraga Ragunan Jakarta, SMA Negeri 9 Plus Olahraga Lhong Raya Aceh, SMP dan SMA Olahraga Sriwijaya Palembang dan SMAN Olahraga Sidoarjo Jawa Timur, serta SMKONTBI Kaltim. Melihat permasalahan-permasalahan antara pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar yang muncul dan sudah terdapat lima Provinsi yang mempunyai Sekolah Olahraga untuk mengatasi permasalahan tersebut maka saat ini Provinsi Jawa Tengah juga sudah harus memikirkan untuk mengembangkan sebuah Sekolah Olahraga.

B. TUJUAN

1. Menganalisis permasalahan pendidikan dan pembinaan olahraga yang terjadi saat ini di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis agenda kebijakan terkait permasalahan pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis pemilihan alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar di Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis penetapan dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan terpilih.

C. TEORI

Dalam memformulasikan kebijakan publik, mempunyai beberapa tahapan (Budi Winarno, 2008) sebagaimana berikut : (a) Perumusan Masalah; (b) Agenda Kebijakan; (c) Pemilihan Alternatif Kebijakan, yaitu menyangkut : *Technical Feasibility* (Kelayakan Teknis). *Economic and Financial Possibility* (Kemungkinan Ekonomi dan Finansial). *Political Viability* (Kehidupan Politik). *Administrative Operability* (Administrasi) yang didalamnya meliputi *authority* (kewenangan), *institutional commitment* (komitmen), *capability* (kemampuan SDM), *organizational support* (dukungan sarana prasarana) oleh Bardach yang dikutip Patton and Sawicky (dalam Keban, 2008: 71) ; (d) Penetapan Kebijakan.

D. METODE

Desain Penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif.

Situs Penelitian (Lokus Penelitian). Lokus dalam penelitian ini adalah di Provinsi Jawa Tengah karena Provinsi

Jawa Tengah saat ini sudah mempunyai PPLP yang diharapkan menjadi embrio dari Sekolah Olahraga dan yang lebih penting adalah di Provinsi Jawa Tengah sendiri terdapat permasalahan antara pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar.

Subyek Penelitian (Informan). Di dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. Adapun informan yang dipilih yaitu : (1) Kepala Bidang Keolahragaan Dinpora Prov. Jateng; (2) Wakil Kepala Bidang Rencana dan Dana KONI Prov. Jateng; (3) Kepala Seksi Pengendalian Mutu DIKMEN Disdik Prov. Jateng; (4) Kepala Seksi SMA & SMK Disdik Kota Semarang; (5) Pelatih PPLP Cabang Olahraga Gulat; (6) Atlet PPLP Cabang Olahraga Gulat.

Sumber Data. Data Primer adalah data informasi yang diperoleh langsung dari informan. Data Sekunder adalah Data yang diperoleh dari studi pustaka, dokumen-dokumen maupun dari penelitian sebelumnya.

Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu yang berasal dari wawancara, dari dokumen-dokumen maupun melalui pengamatan dilapangan.

Analisis Data. Dalam penelitian ini, tahapan yang dilakukan penulis dalam melakukan kegiatan analisis data dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu : (a) *Data Reduction* (Merangkum Data); (b) *Data Display* (Penyajian Data); (c) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan).

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam menganalisis Alternatif Kebijakan Pengembangan Sekolah Olahraga yang terkait dengan masalah pendidikan dan pembinaan olahraga

atlet pelajar di Provinsi Jawa Tengah ini pada dasarnya melalui empat tahapan berdasarkan Teori Formulasi Kebijakan (Budi Winarno, 2008) yaitu : (a) Perumusan Masalah; (b) Agenda Kebijakan; (c) Pemilihan Alternatif Kebijakan, dan (d) Penetapan Kebijakan yang kemudian akan direkomendasikan kepada pengambil keputusan yang memiliki legitimasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka empat tahapan formulasi kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perumusan Masalah

Masih terpisahnya kegiatan pendidikan dan pembinaan olahraga yang menyebabkan terdapat sekolah yang tidak memberikan ijin dispensasi terhadap atlet pelajar ketika akan mengikuti pertandingan, keterlambatan proses pencairan anggaran untuk uang sekolah atlet PPLP, masih kurangnya minat orangtua untuk mendorong anaknya menekuni olahraga secara serius, proses latihan dan proses belajar mengajar yang terlalu dekat serta masih terdapat sekolah yang kadang tidak memberikan dispensasi terkait jam keberangkatan sekolah atlet, dan pola pembinaan olahraga di Provinsi Jawa Tengah yang masih bersifat desentralisasi.

2. Agenda Setting

Permasalahan pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar di Provinsi Jawa Tengah sudah mampu dikatakan mendesak dan berdampak besar karena masih ditemukan bahwa sekolah tidak mau menerima ijin dispensasi atlet pelajar dan sudah ada yang pernah tidak lulus maupun tidak naik kelas.

Disamping itu, sudah ada lima daerah Provinsi yang sudah mempunyai sekolah khusus olahraga.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan

Dalam pemilihan alternatif kebijakan ini, muncul empat alternatif kebijakan yang kemudian dinilai menggunakan Teori Bardach yang dikutip Patton and Sawicky (dalam Keban, 2008; 71) yang hasilnya adalah :

a. Kebijakan Pengembangan Sekolah Olahraga

Technical Feasibility. Dinilai mampu mengatasi permasalahan pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar karena pelaksanaan teknis dari Sekolah Olahraga akan berbeda dengan sekolah menengah pada umumnya yaitu kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan pembinaan olahraga, kegiatan pendidikan dan pembinaan olahraga menjadi tersentralkan, serta untuk menjaga prestasi sekolah olahraga nantinya akan menggunakan sistem evaluasi promosi degradasi setiap pergantian tahun pelajaran.

Economic and Financial Possibility. Biaya pengoptimalan kebijakan tinggi meskipun untuk proses pendidikan akan dibiayai dari Pusat.

Political Viability. Dukungan sepenuhnya dari Pusat, Swasta, KONI, Pakar Olahraga, Pelatih hingga Atlet PPLP dan juga terkait dengan legalitas, kebijakan ini tidak bertentangan

dengan peraturan yang sudah ada.

Administrative Operability.

Kejelasan wewenang dan tugas pokok dari masing-masing Dinas teknis pelaksana, komitmen yang tinggi dan konsistensi dari seluruh jajaran Dinpora, KONI dan Dinas Pendidikan, kemampuan SDM sudah ada, dan sudah ada dukungan peralatan meskipun masih perlu ditingkatkan.

b. Kebijakan Pembuatan Mou dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah

Technical Feasibility. Belum mampu mengatasi permasalahan karena alternatif kebijakan ini, hanya bersifat kesepakatan untuk memberikan kemudahan bagi atlet pelajar tanpa mempunyai kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan kurikulum pendidikan di sekolah tersebut, disamping itu kegiatan pendidikan dan pembinaan olahraga masih bersifat desentralisasi di daerah Kabupaten Kota masing-masing.

Economic and Financial Possibility. Tidak membutuhkan biaya yang tinggi dan seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh Pusat.

Political Viability. Dukungan dari Dinpora, KONI dan Dinas Pendidikan, meskipun dukungan tersebut saat ini sudah mengarah ke Pengembangan Sekolah Olahraga.

Administrative Operability.

Kewenangan jelas, adanya komitmen meskipun sebenarnya sudah mengarah kepada Pengembangan Sekolah Olahraga, kemudian kemampuan SDM pendidik yang memadai, dan sudah ada dukungan peralatan meskipun masih perlu ditingkatkan

c. Kebijakan Kelas Olahraga***Technical Feasibility.***

Belum mampu mengatasi permasalahan karena pola pembinaan masih bersifat desentralisasi, antara kegiatan pendidikan dan pembinaan masih terpisah meskipun sebenarnya teknis kelas olahraga nantinya akan berbeda dengan sekolah umum.

Economic and Financial Possibility. Tidak membutuhkan biaya yang tinggi dan seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh Pusat.

Political Viability. Dukungan dari Dinpora, KONI dan Dinas Pendidikan, meskipun dukungan tersebut saat ini sudah mengarah ke Pengembangan Sekolah Olahraga.

Administrative Operability.

Kewenangan jelas, adanya komitmen namun tidak maksimal karena sudah mengarah kepada Pengembangan Sekolah Olahraga, kemampuan SDM pendidik yang memadai, dan sudah ada dukungan peralatan meskipun masih perlu ditingkatkan.

d. Kebijakan Status Quo***Technical Feasibility.***

Pembinaan Olahraga ditempatkan dalam sebuah mess sesuai cabang olahraganya, sedangkan pendidikan atlet dititipkan di sekolah terdekat. Pembinaan olahraga yang masih bersifat desentralisasi dan antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pembinaan olahraga masih berada di tempat yang terpisah.

Economic and Financial Possibility. Biayanya sudah dianggarkan oleh Pusat.

Political Viability. Belum adanya satu pandangan terhadap pentingnya berolahraga.

Administrative Operability.

Kejelasan wewenang, adanya komitmen untuk menjalankan Program PPLP, kemampuan SDM pelatih masih perlu ditingkatkan, dan sudah ada dukungan peralatan meskipun masih perlu ditingkatkan.

e. Pemilihan Alternatif Kebijakan Melalui Uji Scoring

Setelah melalui proses uji alternatif kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan dari alternatif kebijakan yang muncul. Pemilihan alternatif kebijakan tersebut akan menggunakan metode uji *scoring*. Pedoman penilaian kriteria kebijakan berdasarkan Skala *Likert* yaitu skala yang mempunyai gradasi dari sangat

positif sampai sangat negatif. (dalam Sugiyono, 2010 : 135). Pengertian di atas diterjemahkan dengan menggunakan 5 skala nilai sebagai berikut : 1) sangat lemah, 2) agak lemah, 3) sedang, 4) agak kuat, dan 5) sangat kuat. Untuk menentukan besarnya nilai berdasarkan skala nilai tersebut digunakan pedoman sebagai berikut :

Tabel 1
Pedoman Dalam Memberikan Nilai
Berdasarkan Skala *Likert*

Kriteria	Penentuan Nilai	
	5- Sangat Kuat	1- Sangat Lemah
Technical Feasibility	Kebijakan yang diambil dapat mengatasi permasalahan pendidikan dan pembinaan atlet pelajar di Provinsi Jawa Tengah.	Kebijakan yang diambil tidak dapat mengatasi permasalahan pendidikan dan pembinaan atlet pelajar di Provinsi Jawa Tengah.
Economic and Financial Possibility	Memerlukan biaya yang rendah sekali.	Memerlukan biaya yang sangat tinggi.
Political Viability	Kebijakan yang diambil bisa diterima dan mendapat dukungan dari semua pihak yang berkepentingan.	Kebijakan yang diambil tidak dapat diterima dan tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari semua pihak yang berkepentingan.
Administrative Operability	<p>Kewenangan pelaksanaan jelas.</p> <p>Komitmen yang tinggi dan konsistensinya dari administrator level atas dan bawah, kantor, dan pekerja lapangan.</p> <p>Kemampuan SDM untuk melaksanakan kebijakan terpilih, memadai.</p> <p>Sarana Prasarana yang dimiliki untuk menunjang alternatif yang dipilih sangat lengkap dan memadai.</p>	<p>Tidak adanya kewenangan yang jelas.</p> <p>Komitmen yang rendah dan tidak adanya konsistensi dari administrator level atas dan bawah, kantor, dan pekerja lapangan.</p> <p>Kemampuan SDM untuk melaksanakan kebijakan terpilih tidak memadai.</p> <p>Sarana Prasarana yang dimiliki untuk menunjang alternatif yang dipilih kurang lengkap dan kurang memadai.</p>

Alternatif Kebijakan I :

Kriteria :

1. *Technical Feasibility*, score : 5
2. *Economic and Financial Possibility*, score : 2
3. *Political Viability*, score : 5
4. *Administrative Operability*, score : 4

Total score : 16

Alternatif Kebijakan II :

Kriteria :

1. *Technical Feasibility*, score : 2
2. *Economic and Financial Possibility*, score : 4
3. *Political Viability*, score : 2
4. *Administrative Operability*, score : 3

Total score : 11

Alternatif Kebijakan III :

Kriteria :

1. *Technical Feasibility*, score : 2
2. *Economic and Financial Possibility*, score : 4
3. *Political Viability*, score : 2
4. *Administrative Operability*, score : 3

Total score : 11

Alternatif Kebijakan IV :

Kriteria :

1. *Technical Feasibility*, score : 2
2. *Economic and Financial Possibility*, score : 5
3. *Political Viability*, score : 1
4. *Administrative Operability*, score : 2

Total score : 10

Dari hasil yang telah dilakukan untuk menilai alternatif kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar maka dipilihlah Kebijakan Pengembangan Sekolah Olahraga.

Hal tersebut karena dalam Sekolah Olahraga nantinya akan menyatukan antara kegiatan pendidikan dan pembinaan olahraganya di satu tempat yang sama agar pembinaan yang dilakukan setelah adanya Sekolah Olahraga ini dari yang semula bersifat desentralisasi menjadi bersifat sentralisasi yang selama ini selalu menjadi alasan di dalam permasalahan pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar ini. Meskipun kelemahan Kebijakan Pengembangan Sekolah Olahraga ini ada pada parameter *Economic and Financial Possibility* karena yang pasti dibutuhkan dana yang besar untuk pembangunan sekolah olahraga tersebut, namun Provinsi Jawa Tengah sebenarnya sudah mempunyai modal lahan yang luas untuk pembangunan sekolah olahraga yang bertempat di kawasan sekitar TVRI Provinsi Jawa Tengah di daerah Pucanggading maupun di Komplek Gelanggang Olahraga Jatidiri. Disamping itu, kerjasama dengan swasta pun sudah dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah.

4. Penetapan Kebijakan

Sekolah Olahraga adalah sekolah yang nantinya akan berada dibawah dua kewenangan yaitu kewenangan pendidikan akan diampu oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang dibawahnya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota terpilih dengan kewenangan olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dan dibantu oleh KONI Provinsi Jawa Tengah, maka strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Pemuda dalam menetapkan Kebijakan Sekolah Olahraga ini nantinya dengan melalui Penandatanganan MoU antara Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota terpilih, dan KONI Provinsi Jawa Tengah, kemudian pada teknis pelaksanaan kebijakan nantinya ketika sekolah olahraga ini sudah dibangun, koordinasi harus tetap dilakukan. Selain koordinasi, perlu juga dilakukan sebuah evaluasi dengan bentuk Sistem Promosi Degradasi setiap tahunnya. Tujuan dari Sistem Promosi Degradasi tersebut agar para atlet pelajar yang bersekolah di Sekolah Olahraga tidak terus menjadi malas dalam belajar dan berlatih karena selalu termotivasi dengan sistem yang diterapkan di Sekolah Olahraga nantinya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian proses Formulasi Kebijakan Publik, yaitu merumuskan masalah kebijakan; mengagendakan kebijakan; pemilihan alternatif kebijakan, dan menetapkan kebijakan yang kemudian akan direkomendasikan kepada pengambil keputusan yang memiliki legitimasi, maka dipilihlah bahwa Kebijakan Pengembangan Sekolah Olahraga adalah kebijakan yang dinilai tepat dan mampu untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun kelemahan dalam Pembangunan Sekolah Olahraga adalah pada kriteria *Economic and Financial Possibility*, namun Formulasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Olahraga ini mempunyai keunggulan dari ketiga kriteria parameter kebijakan yang lainnya, yaitu *Technical Feasibility*, *Political Viability*, *Administrative Operability*.

2. Saran

- a. Dalam pendirian atau pengembangan Sekolah Olahraga di Provinsi Jawa Tengah ini nantinya diwujudkan melalui Penandatanganan MoU antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang ditunjuk dan KONI Provinsi Jawa Tengah.
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah harus selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang ditunjuk dan KONI Provinsi Jawa Tengah agar segera mempunyai satu pandangan terkait pentingnya pengembangan Sekolah Olahraga dan teknis pelaksanaan Sekolah Olahraga nantinya.
- c. Perlu melakukan koordinasi dan bimbingan teknis secara berkala dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia agar para aparat teknis pelaksana memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam Kebijakan Pengembangan Sekolah Olahraga.
- d. Perlu mengadakan studi banding ke Provinsi yang sudah mempunyai sekolah olahraga seperti di Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai Sekolah Olahraga Ragunan dan Provinsi Jawa Timur yang mempunyai SMANOR Sidoarjo Jawa Timur.
- e. Melakukan kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM terutama kualitas pelatih olahraga agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
- f. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah bersedia

untuk membangun kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat agar masing-masing pihak bersinergi dan dapat bekerjasama dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan, mengendalikan, serta mengawasi jalannya Kebijakan Pengembangan Sekolah Olahraga di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damai Damadi dan Sudikin. 2009. Administrasi Publik. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Keban, Yeremias. T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Machfoedz, Ircham. 2007. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Fitramaya.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Poerwanti, Yuni. 2012. Manajemen Olahraga Nasional Dari Kebijakan Hingga Komitmen Teori dan Aplikasi. Jakarta Timur : MAGNAScript Publishing.
- Prastowo, Andi. 2010. Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna). Jogjakarta : DIVA Press.
- Putra, Faradillah. 2001. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan

Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung : Alfabeta.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo.

Non Buku

Laporan Kegiatan PPLP Provinsi Jawa Tengah TA. 2012. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

Majalah Formula Edisi 01/Mei/2007 tentang Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Jambi Ubah Metode Rekrutmen Atlet.

Majalah Formula Edisi 19/Sept/2009 tentang Menpora Dukung Kaltim Miliki Sekolah Olahraga.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Penyelenggaraan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP). Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan Iptek Olahraga Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2006.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Skripsi

Puspasari, Kartika. 2008. Analisis Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Website

[http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa Tengah](http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah) diakses pada tanggal 2 Maret 2013 hari Rabu jam 12.35

<http://jateng.bps.go.id/Publikasi%20Terbit/2012/jawa%20tengah%20dalam%20angka%202012/index.html> diakses pada tanggal 2 Maret 2013 hari Rabu jam 12:40.

<http://kominform.jatimprov.go.id/watch/18491> diakses pada tanggal 17 Februari 2012 hari Minggu jam 16:50.

<http://www.tribunnews.com/2011/12/03/akar-masalah-terlantarnya-atlet-karena-tak-bersekolah> diakses pada tanggal 17 Februari 2013 hari Minggu jam 15:25.